BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa pembangunan seperti sekarang ini, pemerintah memerlukan dana yang cukup besar. Untuk mencukupi dana pembangunan tersebut pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan negara dari sumber penerimaan dalam negeri yaitu dari sektor migas dan sektor non migas. Karena pada saat ini sektor migas tidak dapat diandalkan, maka sektor non migaslah yang diharapkan bisa mencukupi penerimaan untuk membiayai pembangunan. Dan salah satu pendapatan negara tersebut adalah dari sektor pajak.

Agar pembangunan selalu bertumpu pada Trilogi pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh GBHN yang seiring dengan hal tersebut maka dapat diciptakan kepastian hukum yang berkaitan dengan aspek perpajakan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha yang terus berkembang. Agar hal tersebut bisa tercapai, maka diperlukan langkah-langkah pembaharuan di bidang perpajakan nasional, diantaranya :

a. Sistem perpajakan yang mudah dimengerti oleh semua lapisan masyarakat

b. Sistem perpajakan yang berdasarkan sistem keadilan dan pemerataan

c. Sistem perpajakan yang memberikan kepastian hukum kepada para wajib pajak

Berdasar kepada sistem diatas maka perlu dibentuk Undang-undang perpajakan yang memadai dengan memperhatikan latar belakang warga masyarakat Indonesia pada umumnya yang tercermin dalam suatu ketentuan untuk mengatur mekanisme pemungutan pajak, yang meliputi :

1. Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta para wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dalam pembiayaan untuk pembangunan nasional
2. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai penerimaan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota wajib pajak sendiri
3. Para wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kewajibannya dengan sistem menghitung, memperhitungkan dan membayar serta melaporkan sendiri pajak terutangnya

Tahap pembangunan ekonomi di negara kita dewasa ini adalah sebagai salah satu usaha dalam mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia, yang telah berlangsung beberapa lama dan hasilnya telah kita rasakan bersama. Pembangunan yang telah dicapai sekarang ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Dengan semakin berkembangnya pembangunan tersebut maka semakin diperlukan penghimpunan dana guna membiayai pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut. Dukungan dana tersebut dapat berasal

dari anggaran keuangan pemerintah maupun dana yang berasal dari segenap lapisan masyarakat diantaranya dari penarikan pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan dan iuran-iuran lainnya yang ditarik dari masyarakat. Dengan demikian pemerintah menggalakan suatu aturan mengenai kewajiban membayar pajak. Kesadaran masyarakat untuk berperan serta dalam membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan sangatlah diperlukan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai salah satu sumber keuangan negara, yang sekaligus sumber dana pembangunan daerah. Dimana pajak tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan Indonesia pada umumnya dan daerah pembayar Pajak Bumi dan Bangunan yang bersangkutan pada khususnya.

Pajak Bumi dan bangunan tidak dapat disangkal lagi memberikan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Oleh karena itu wajar apabila mereka diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pajak.

Dengan demikian harus ditanamkan pada diri kita, kesadaran dalam membayar iuran pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan, karena iuran dari Pajak Bumi dan Bangunan yang kita bayarkan tersebut digunakan bukan saja untuk kepentingan pemerintah melainkan untuk kepentingan kita juga. Dan salah satu jalan pemerintah dalam membiayai pembangunannya

tersebut adalah adanya kesadaran dari masyarakat untuk aktif dalam membayar iuran pajak.

Dengan adanya Pajak Bumi dan Bangunan, diharapkan pendapatan Pemerintah Daerah akan lebih meningkat. Dengan lebih meningkatnya pendapatan daerah, maka laju pembangunan daerah akan lebih meningkat pula.

Demikian juga Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta terus berusaha menggali sumber-sumber dana yang dimiliki daerahnya untuk membiayai pembangunan. Dimana Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber dana yang dimilikinya. Walaupun Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat, tetapi dalam pengelolaan penarikannya Pajak Bumi dan Bangunan tersebut sepenuhnya diserahkan pada pemerintah daerah yang bersangkutan.

Disamping itu, Pajak Bumi dan Bangunan ingin mewujudkan adanya kesederhanaan, kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Kesederhanaan, kemudahan dan kepastian hukum diwujudkan dengan tarif tunggal, cara pengenaan pajak, obyek pajak yang tidak banyak jenisnya dan tidak dipungut pajak berkali-kali atas obyek yang sama.

Berdasarkan uraian diatas penulis beranggapan bahwa penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sangat berpengaruh terhadap dana pembangunan, hal ini disebabkan karena Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber dana dalam menunjang pelaksanaan

kegiatan pembangunan. Dari uraian diatas penulis menetapka judul " **Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Peningkatan Dana Pembangunan Daerah Di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta ".**

Demikianlah, mengapa penulis berusaha mengemukakan masalah Pajak Bumi dan Bangunan ini yang oleh penulis dikaitkan dengan dana pembangunan daerah. Diantaranya agar pokok masalah Pajak Bumi dan Bangunan ini menjadi perhatian oleh semua pihak baik bagi pemerintah sendiri maupun bagi masyarakat. Dimana antara masyarakat dengan pemerintah harus saling membantu demi kelancaran pembangunan.

1.2 Maksud dan Tujuan Penulisan

Adapun maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian yaitu untuk mendapatkan data maupun informasi yang dapat menunjang dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini.

Maksud penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Diajukan untuk melengkapi laporan dan memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Diploma III pada jurusan Ahli Komputer Keuangan Perbankan pada Lembaga Pendidikan Komputer Indonesia Jerman.
2. Untuk menambah wawasan pengetahuan dengan memahami antara pengetahuan yang diperoleh selama kuliah dengan kenyataan sebenarnya, khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Mempunyai kemampuan untuk mengembangkan pelajaran yang terdapat di kampus dengan penerapannya didalam Praktek Kerja Lapangan.
4. Dalam meluaskan pandangan atau pemikiran terhadap jasa-jasa pekerjaan yang ada di tempat praktek kerja sehingga keterangan pekerjaan akan diperoleh untuk masa yang akan datang.
5. Memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan.

Tujuan penulis melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dana Pembangunan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta.
3. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap peningkatan dana pembangunan daerah di daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta.

1.3 Metodelogi Penelitian

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini diperlukan adanya data sebagai bukti bagi pemecahan masalah, dimana data yang diperoleh untuk memecahkan masalah-masalah tersebut diperoleh dari penelitian.

Metode yang digunakan dalam membahas Tugas Akhir ini yaitu dengan menggunakan metode Deskriptif Analisys yang artinya mengumpulkan data, mengolah data dan menganalisanya yang kemudian

menarik kesimpulan serta memberikan saran-saran. Sedangkan teknik pengumpulan data dan informasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Yaitu dengan mengadakan studi perpustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan keterangan-keterangan dari buku-buku yang mempunyai kaitan atau hubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

2. Studi Lapangan

Yaitu dengan melakukan penelitian ke lapangan secara langsung pada obyek yang sedang diteliti dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan. Kemudian didalam pelaksanaan penghimpunan data, maka penulis menggunakan cara pendekatan sebagai berikut :

a. Observasi

Penulis melakukan penelitian secara langsung pada obyek yang sedang diteliti yang bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dan berhubungan erat dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Penulis mengadakan wawancara (interview) langsung secara sistematis dengan beberapa orang karyawan yang berkecimpung dan dianggap perlu atau lebih berhak untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diambil oleh penulis dalam penyusunan laporan Tugas Akhir.

1.4 Pembatasan Masalah

Dikarenakan kemampuan, pengalaman, dan sumber yang terbatas serta untuk menghindari meluasnya permasalahan, penulis membatasi masalah hanya pada bagian Pajak Bumi dan Bangunan. Ini sesuai dengan tempat praktek kerja penulis yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Maka penulis mengidentifikasikan masalah yang berkaitan dengan judul Tugas Akhir yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta ?
2. Bagaimana perkembangan dana Pembangunan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta ?
3. Bagaimana pengaruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap peningkatan dana pembangunan daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta ?

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menerangkan tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penulisan, Metodelogi Penelitian, Pembatasan Masalah, serta Sistematika dari penulisan Tugas Akhir ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menerangkan tentang Pengertian Pajak, Jenis Pajak, Fungsi Pajak, Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan, Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan, Pengertian Dana Pembangunan, Sumber-sumber Dana Pembangunan, Subyek Pajak Bumi dan Bangunan serta Obyek Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB III : DATA HASIL PENELITIAN

Menerangkan tentang Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Uraian Tugas dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Sumber-sumber Dana Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta, Perkembangan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan serta Perkembangan Dana Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta.

BAB IV : ANALISA HASIL PENELITIAN

Menerangkan tentang pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam pembahasan ini memuat tentang kesimpulan dan saran.